

Katalog: 2104012.3277

GAMBARAN PEMBANGUNAN JENDER KOTA CIMAHI 2013



*Badan Pusat Statistik
Kota Cimahi*

Kata Pengantar

K eberhasilan pembangunan tidak saja dilihat dari pertumbuhan ekonomi melainkan juga dari pembangunan manusianya. Tujuan pembangunan akan tercapai bila kualitas hidup penduduknya dapat ditingkatkan. Publikasi ini mencoba melihat telah sejauh manakah pembangunan di Kota Cimahi memberikan manfaat baik kepada laki-laki maupun perempuan melalui suatu ukuran pencapaian pembangunan manusia yang berbasis jender yaitu Indeks Pembangunan Jender (IPJ). Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks ini melihat pemerataan hasil pembangunan bagi kedua jenis kelamin dari tiga aspek yaitu aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Buku ini merupakan salah satu ragam publikasi yang disusun atas prakarsa BPS Kota Cimahi dalam rangka menyebarluaskan data statistik khususnya yang berkaitan dengan jender.

Semoga publikasi ini dapat memperluas wawasan dan memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna data secara umum maupun para pengambil kebijakan. Kritik dan saran demi memperbaiki publikasi ini di masa mendatang sangat kami harapkan.

Cimahi, 31 Juli 2015

Kepala BPS Kota Cimahi,



Drs. H. Agus Praptono, M.Stat
NIP. 19660802 199401 1001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Apakah Jender Itu ?	1
Berbagai Konsensus Nasional dan Internasional Tentang Jender	4
Berbagai Konsensus Internasional Tentang Jender	5
Konsensus Jender di Indonesia	7
Alat Pengukur Kesetaraan Jender	9
Perkembangan Pembangunan Jender	14
Pencapaian Komponen Indeks Pembangunan Jender	13
Disparitas Pembangunan Jender	23
Kesenjangan di Bidang Pendidikan	24
Kesenjangan di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan	27



APAKAH JENDER ITU ?

J

ender atau *gender* (bahasa inggris) berasal dari bahasa latin yaitu “genus”, yang berarti tipe atau jenis. Jender berbeda dengan sex. Sex atau jenis kelamin adalah perbedaan yang bersifat biologis dan merupakan kodrat Tuhan sehingga berlaku universal. Sementara jender lebih berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya dan psikologis. Jender sebagai perbedaan sifat dan perilaku pada laki-laki dan perempuan terbentuk melalui proses sosial dan budaya yang panjang.

Jender merupakan seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, bukan secara biologis dan peran ini dapat berubah sesuai budaya, kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Karena dibentuk oleh sosial budaya setempat, maka gender berubah dari waktu ke waktu dan tidak berlaku selamanya. Sebagai contoh : kalau dulu hanya perempuan yang menggunakan anting-anting, akhir-akhir ini ternyata banyak juga laki-laki yang menggunakan anting-anting. Tren juga sangat

tergantung kepada tempat dan wilayah, misalnya bila di sebuah desa perempuan memakai celana dianggap tidak pantas, maka di tempat lain bahkan sudah jarang menemukan perempuan memakai rok. Karena bentukan juga, maka gender bisa dipertukarkan. Misalnya kalau dulu pekerjaan memasak selalu dikaitkan dengan perempuan, maka sekarang ini sudah mulai banyak laki-laki yang malu karena tidak bisa mengurus dapur atau susah karena harus tergantung kepada perempuan agar tidak kelaparan.

Ketidaksetaraan jender adalah perlakuan diskriminatif/berbeda baik yang diterima laki-laki maupun perempuan. Perbedaan perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi ataupun keinginannya sehingga merugikan salah satu jenis kelamin. Ketidakadilan jender adalah ketidakadilan bagi perempuan ataupun laki-laki berdasarkan sistem dan struktur yang ada. Ketidakadilan jender disebabkan oleh akses, partisipasi dan kontrol yang tidak seimbang bagi perempuan maupun laki-laki dalam mendapat pendidikan, pekerjaan atau kesehatan seperti seharusnya. Manifestasi dari ketidakadilan ini adalah marjinalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban ganda :

- **Marginalisasi (peminggiran).** Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Misalkan banyak perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. Hal ini terjadi karena hanya sedikit perempuan yang mendapatkan peluang pendidikan. Peminggiran dapat terjadi di rumah, tempat kerja , masyarakat, bahkan oleh negara yang bersumber dari keyakinan,

tradisi/kebiasaan, kebijakan pemerintah, maupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan (teknologi).

- **Subordinasi (penomorduaan)**, anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki. Stereotip (citra buruk) yaitu pelabelan negatif yang diberikan masyarakat kepada jenis kelamin tertentu, umumnya terhadap perempuan. Sebagai contoh, masyarakat menganggap laki-laki itu rasional, kuat, aktif, dan sebagainya. Sebaliknya, perempuan itu emosional, penakut, pasif dan sebagainya. Stereotip itu kemudian menjadi dasar untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dianggap tidak pantas menjadi pemimpin karena dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan daripada rasio.
- **Violence (kekerasan)**, yaitu serangan fisik dan psikis. Perempuan adalah pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip diatas. Perkosaan, pelecehan seksual atau perampokan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan.
- **Beban kerja berlebihan**, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya seseorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah, disamping itu, kadang ia juga mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas.



BERBAGAI KONSENSUS NASIONAL DAN INTERNASIONAL TENTANG JENDER

Keluarga menurut UU Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10 adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anaknya, atau istri dan anaknya (BKKBN, 1992). Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang diikat melalui perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual, bertakwa kepada Tuhan YME, mempunyai hubungan yang harmonis, serasi dan seimbang antar anggota keluarga, antar keluarga dan antara keluarga dan lingkungan. Dari definisi keluarga tersebut tampak bahwa kesejahteraan dalam keluarga membutuhkan adanya hubungan yang seimbang dan setara antar anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan.

Jender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan jender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak akan menimbulkan persoalan bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi

ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan jender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Berbagai Konsensus Internasional Tentang Jender

Permasalahan jender telah lama menjadi perhatian dunia dan menyebabkan tumbuhnya berbagai konsensus. Satu momen penting adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*) pada Tahun 1979. Konvensi ini menyediakan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan memastikan adanya akses dan kesempatan yang sama dalam kehidupan politik dan publik - termasuk hak untuk memilih dan dipilih - serta pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan.

Konvensi ini telah banyak mengubah sudut pandang mengenai perempuan sehingga pada Tahun 1994 diadakan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development – ICPD*) di Kairo. Konferensi ini membawa suatu strategi pembangunan baru yang memusatkan perhatian pada terpenuhinya kebutuhan manusia secara individu (*people centered development*) dimana kuncinya adalah pemberdayaan perempuan dan pemberian lebih banyak pilihan kepada mereka melalui perluasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan keterampilan

dan lapangan pekerjaan (UNFPA, 1994). Pemberdayaan perempuan ini adalah untuk tercapainya sasaran persamaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, memungkinkan perempuan untuk mewujudkan potensinya, dan melibatkan perempuan sebagai pembuat keputusan dalam segala aspek kehidupan ekonomi, politik dan budaya.

Setahun kemudian, tepatnya 1995, di Beijing diadakan konferensi tingkat dunia mengenai perempuan (*The Fourth World Conference On Women*) dan berhasil mendeklarasikan Landasan Aksi Beijing (*Beijing Platform for Action - BPFA*). Deklarasi yang diikuti oleh Indonesia ini menekankan bahwa kesetaraan dalam pengambilan keputusan sangat penting dalam pemberdayaan perempuan. BPFA juga menyatakan bahwa partisipasi sejajar antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan tidak hanya berkaitan dengan keadilan ataupun demokrasi tetapi juga agar keinginan dan kebutuhan perempuan turut diperhatikan. Untuk mencapai tujuan itu BPFA mendeklarasikan program aksi yang meliputi 12 area kritis, yaitu :

- (1) perempuan dan kemiskinan;
- (2) pendidikan dan pelatihan untuk perempuan;
- (3) perempuan dan kesehatan;
- (4) kekerasan terhadap perempuan;
- (5) perempuan dan konflik bersenjata;
- (6) perempuan dan ekonomi;
- (7) perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan;
- (8) mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan;
- (9) hak asasi manusia, penghapusan segala bentuk diskriminasi;
- (10) perempuan dan media;
- (11) perempuan dan lingkungan;
- (12) anak perempuan.

Perempuan sedunia tiap tahun berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, untuk melaporkan kemajuan pelaksanaan BPFA di masing-masing negara, saling tukar-menukar pengalaman dan menggalang kerjasama multilateral atau pun bilateral.

Pada tahun yang sama, UNDP dalam publikasi *Human Development Report (HDR)* juga mengangkat tema mengenai jender. Publikasi tersebut menekankan bahwa pembangunan manusia merupakan upaya untuk memperluas pilihan bagi semua masyarakat, bukan hanya salah satu bagian saja dari masyarakat sehingga tidak ada yang terkecualikan. Dalam publikasi tersebut juga tersirat pesan bahwa pengabaian aspek jender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah.

Selain itu, salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) atau MDG's pada Tahun 2015 adalah mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan. Deklarasi yang telah disepakati oleh 189 negara anggota PBB pada Tahun 2000 tersebut menjadi bukti keprihatinan negara-negara di dunia terhadap permasalahan ketidakadilan jender yang terutama kerap menimpa kaum perempuan.

Konsensus Jender di Indonesia

Bagi masyarakat Indonesia, kesetaraan atau kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan bukanlah hal baru. Pemerintah pusat memiliki komitmen kuat terhadap masalah jender dan kebijakan penyetaraan serta persamaan hak bagi seluruh rakyat sebagaimana termaktub dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai salah satu upaya memperjuangkan hak-hak perempuan, pada Tahun 1978 dibentuklah Menteri Muda Urusan Peranan Wanita yang ditingkatkan statusnya menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita pada Tahun 1983. Pada Tahun 1998, namanya kembali diubah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Pada Tahun 1995, tepat pada Hari Ibu, Presiden RI telah mencanangkan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan sebagai gerakan nasional. Dikatakan bahwa : "Dengan kemitrasejajaran pria dan wanita yang harmonis, kita bangun bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera lahir dan batin". Kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki merupakan kesepakatan nasional yang harus mewarnai seluruh kehidupan bangsa.

Berbagai regulasi juga telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya penyetaraan dan persamaan hak setiap warga negara. Misalnya UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang disahkan untuk mendukung hasil CEDAW, dan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

Pada Tahun 2000 pemerintah bahkan mengeluarkan INPRES No. 9 tentang Pengarusutamaan Jender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan jender akan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.



ALAT PENGUKUR KESETARAAN JENDER

Pada Tahun 1995, dalam publikasi *HDR*-nya (*Human Development Report*), UNDP memperkenalkan suatu indeks untuk mengukur pembangunan jender di suatu wilayah yaitu *Gender Development Index* (Indeks Pembangunan Jender/IPJ) dan *Gender Empowerment Measure/GEM* (Indeks Pemberdayaan Jender/IPJ). Kedua ukuran ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan jender yang dicapai melalui berbagai program pembangunan.

Pencapaian pembangunan manusia secara kuantitatif dapat dilihat dari besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau *HDI* (*Human Development Index*) yang merupakan gabungan dari indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli. Namun besaran angka IPM semata tidak dapat menjelaskan seberapa besar perbedaan (*gap*) pencapaian kualitas hidup perempuan dan laki-laki. Melalui IPJ, perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan

dapat menjelaskan, yakni dengan mengurangi nilai IPM dengan IPJ. Sementara itu, IDJ dapat menggambarkan perbedaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian kapabilitas dan pengambilan keputusan.

IDJ dibentuk dari tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDJ sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen pembentuknya. Sementara itu IPJ, mirip dengan IPM, dibentuk dari tiga komponen yaitu harapan hidup sebagai indikator kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan dan sumbangan pendapatan sebagai indikator ekonomi.

Adapun proses penghitungannya adalah sebagai berikut :

- i. **Menghitung indeks setiap komponen untuk masing-masing jenis kelamin terhadap batasan maksimum dan minimumnya.**

$$Z_i = \frac{A_i - A_{i(\min)}}{A_{i(\max)} - A_{i(\min)}}$$

dimana :

- Z_i = indeks komponen z untuk setiap jenis kelamin i
 A = nilai komponen z
 i = f (perempuan) atau m (laki-laki)

adapun batasan maksimum dan minimum tersebut diberikan pada tabel dibawah.

Tabel 3.1

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPJ

Indikator Komponen IPM (A_i)	Nilai Maksimum (A_i)		Nilai Minimum (A_i)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Angka Harapan Hidup	82,5	87,5	22,5	27,5
Angka Melek Huruf	100	100	0	0
Rata-Rata Lama Sekolah	15	15	0	0
Konsumsi Perkapita	732,72		300,00	

ii. **Menghitung nilai EDEP untuk setiap komponen.**

Penghitungan EDEP (*the equally distributed equivalent achievement*) ini dilakukan untuk mendapatkan ukuran pencapaian yang terdistribusikan dengan merata. Nilai ini merupakan suatu tingkat capaian yang sama antar jenis kelamin dari masing-masing komponen.

$$EDEP_z = [P_f Z_f^{-1} + P_m Z_m^{-1}]^{-1}$$

dimana :

$EDEP_z$ = EDEP untuk komponen z dimana z adalah harapan hidup atau pendidikan

Z_f = indeks perempuan untuk komponen z

Z_m = indeks laki-laki untuk komponen z

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

iii. Penyusunan indeks distribusi pendapatan ($I_{DistInc}$)

Khusus untuk komponen indeks distribusi pendapatan dihitung dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menghitung rasio upah perempuan terhadap upah laki-laki di sektor non pertanian (W_f)
2. Menghitung upah rata-rata (W) dengan rumus :

$$W = AEC_f(W_f) + AEC_m$$

dimana :

AEC_f = proporsi tenaga kerja perempuan (aktif secara ekonomi)

AEC_m = proporsi tenaga kerja laki-laki (aktif secara ekonomi)

W_f = rasio upah perempuan di sektor non pertanian

3. Menghitung rasio upah masing-masing jenis kelamin terhadap upah rata-rata W (R)
4. Menghitung sumbangan pendapatan ($IncS$) untuk masing-masing jenis kelamin dengan rumus :

$$INCS_{(f/m)} = AEC_{(f/m)} \cdot R_{(f/m)}$$

5. Menghitung proporsi sumbangan pendapatan ($PINCS$) untuk masing-masing jenis kelamin dengan rumus :

$$PINCS_{(f/m)} = \frac{INCS_{(f/m)}}{P_{(f/m)}}$$

6. Menghitung $EDEP_{Inc}$ dengan rumus :

$$EDEP_{INC} = [P_f \cdot PINCS_f^{-1} + P_m \cdot PINCS_m^{-1}]^{-1}$$

7. Menghitung indeks sumbangan pendapatan (I_{DisInc}) dengan rumus :

$$I_{DisInc} = \frac{(EDEP_{INC} \cdot PPP) - PPP_{min}}{PPP_{maks} - PPP_{min}}$$

dimana :

PPP = indeks daya beli yang didekati dengan konsumsi per kapita

iv. Penyusunan IPJ

Selanjutnya menghitung IPJ dengan :

$$IPJ = \frac{EDEP_{HH} + EDEP_{DIDIK} + I_{DisInc}}{3}$$

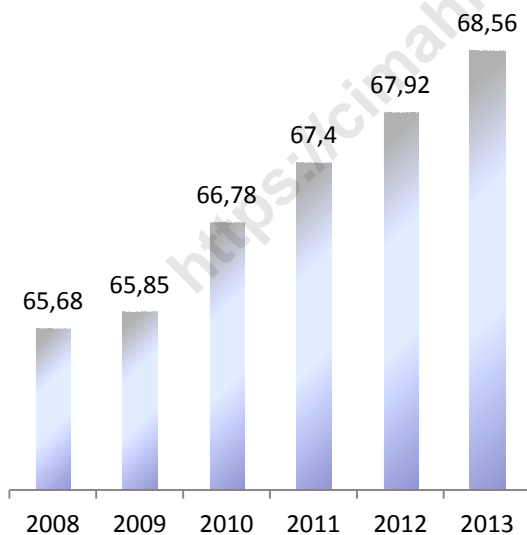
Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survei) merupakan hasil akumulasi baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasilnya, indeks ini akan menggambarkan kondisi perempuan sehubungan dengan peranannya di berbagai bidang.



PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN JENDER

Persamaan status dan kedudukan merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang tidak hanya dijamin oleh perundang-undangan, tetapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jaminan persamaan status dan kedudukan ini meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program-program peningkatan kapabilitas dasar. Program peningkatan kapabilitas dasar yang dimaksud mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan pemerintah kepada semua penduduk. Namun kenyataannya, implementasi kepada kehidupan sehari-hari khususnya upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarki. Nilai-nilai sosial budaya patriarki ini secara langsung maupun tidak langsung dapat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Belum lagi persoalan ketidaktepatan pemahaman ajaran

agama yang seringkali menyudutkan kedudukan dan peranan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat (Parawansa, 2003). Untuk itu, diperlukan upaya lebih serius dan berkesinambungan dalam mewujudkan persamaan status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan melalui berbagai program pembangunan seperti peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan dan lembaga-lembaga lainnya, melalui upaya ini diharapkan peningkatan kapabilitas dasar perempuan akan dapat segera diwujudkan.



Gambar 4.1
Perkembangan IPJ Kota Cimahi
Tahun 2008-2013

Sumber : BPS RI

Secara umum pencapaian pembangunan jender di Kota Cimahi dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang makin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPJ selama kurun waktu 2008- 2013 (Gambar 4.1). Pada Tahun 2008 IPJ Kota

Cimahi mencapai 65,68, kemudian naik menjadi 65,85 pada Tahun 2009 dan bergerak naik lagi dengan cepat hingga menjadi 68,56 pada Tahun 2013.

Namun perlu diperhatikan bahwa peningkatan IPJ dalam kurun waktu 2008-2013 tersebut belum memberikan gambaran yang menggembirakan apabila dilihat dari kerangka pencapaian persamaan status dan kedudukan menuju kesetaraan jender. Hal ini dikarenakan pencapaian IPJ selama kurun waktu tersebut masih belum mampu mengurangi jarak secara nyata dalam pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan. Gap antara IPM dengan IPJ masih terlihat tetap dan cenderung tidak berubah dari besarnya.

Tabel 4.1.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Kota Cimahi Tahun 2008 – 2013

TAHUN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	INDEKS PEMBANGUNAN JENDER (IPJ)	Rasio %
2008	74,79	65,68	87,82
2009	75,17	65,85	87,60
2010	75,51	66,78	88,44
2011	76,01	67,40	88,67
2012	76,28	67,92	89,04
2013	76,86	68,56	89,20

Sumber : BPS RI

Seperti kita ketahui, pembangunan manusia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup selama beberapa dekade telah mengalami kemajuan. Namun, hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas

hidup masih tampak kentara cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan jender, yaitu IPJ yang menunjukkan angka lebih rendah dibandingkan IPM. Pada perkembangannya, selama kurun waktu 2008 – 2013 IPJ Kota Cimahi selalu dalam posisi lebih rendah dibandingkan IPM. Rasio IPJ terhadap IPM yang diperoleh berada pada kisaran 88 persen. Hal ini dapat dimaknai bahwa masih terjadi kesenjangan jender meski IPJ memperlihatkan perkembangan yang selalu meningkat selama periode 2008-2013 (Tabel 4.1). Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kapabilitas dasar penduduk baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan melalui berbagai kebijakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan sehingga gap yang terjadi antara kapabilitas dasar laki-laki dan perempuan dapat diperkecil jaraknya. Keberhasilan upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan angka IPJ.

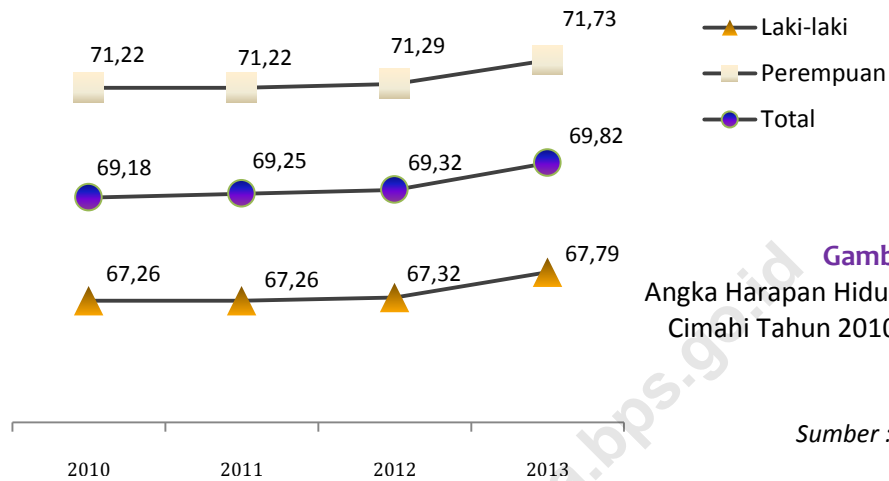
Pencapaian Komponen Indeks Pembangunan Jender

Peningkatan IPJ selama kurun waktu 2008-2013 tersebut tentunya akan dipengaruhi oleh beberapa komponen IPJ itu sendiri. Hal ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu 2008-2013 terus mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan. Pada subbab ini akan dibahas perkembangan masing-masing komponen IPJ di Kota Cimahi.

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Gambar 4.2 memperlihatkan AHH laki-laki dan perempuan Tahun 2010-2013 di Kota Cimahi.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa tidak terjadi perubahan pada AHH laki-laki maupun perempuan pada periode 2010-2013. Hal lain yang lebih mencolok adalah adanya gap antara AHH laki-laki dan perempuan. Hanya saja khusus untuk komponen AHH, angka untuk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Pola ini memang telah umum terjadi di berbagai tempat dimana penyebab utamanya adalah pada awal hidupnya kondisi bayi perempuan memang lebih kuat daripada bayi laki-laki. Angka kematian untuk bayi laki-laki lebih tinggi daripada bayi perempuan. Namun demikian kondisi alami ini tidak mengurangi keharusan bagi pemerintah untuk terus berusaha mempersempit gap antara kesehatan laki-laki dan perempuan ini melalui tindakan promosi kesehatan atau pencegahan yang dapat dilakukan sedini mungkin.



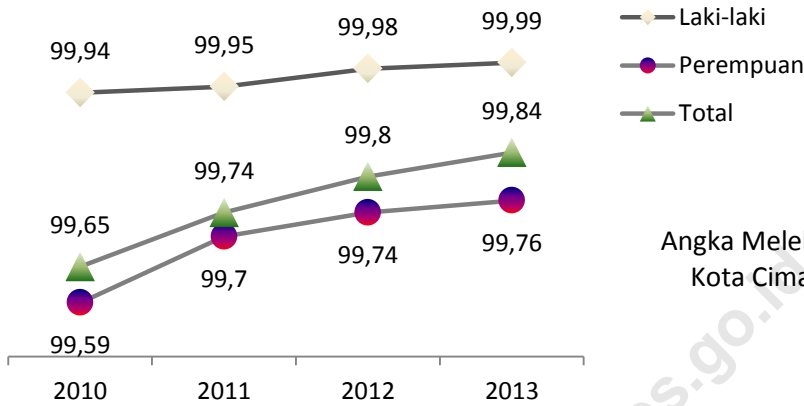
Gambar 4.2
Angka Harapan Hidup Kota Cimahi Tahun 2010-2013

Sumber : BPS RI

Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca adalah dasar bagi manusia untuk menjauhkan diri dari kebodohan. Dengan membaca seseorang dapat belajar dari pikiran dan pengalaman orang lain, mengembangkan pikiran dan wawasannya, meningkatkan pengetahuan mengenai berbagai hal yang terjadi di dunia, juga menambah kearifan dalam bersikap. Pendeknya, membaca dan mengetahui banyak hal akan mengembangkan diri seseorang dan memunculkan sikap menghargai terhadap pikiran dan pendapat orang lain. Karena itu, kemampuan membaca mutlak diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesetaraan dalam hubungan laki-laki dan perempuan.

Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis. Untuk Kota Cimahi, indikator ini menggambarkan kondisi cukup baik karena beberapa tahun terakhir nilai AMH ini berada di atas 99 persen.



Gambar 4.3
 Angka Melek Huruf (AMH)
 Kota Cimahi, 2010-2013

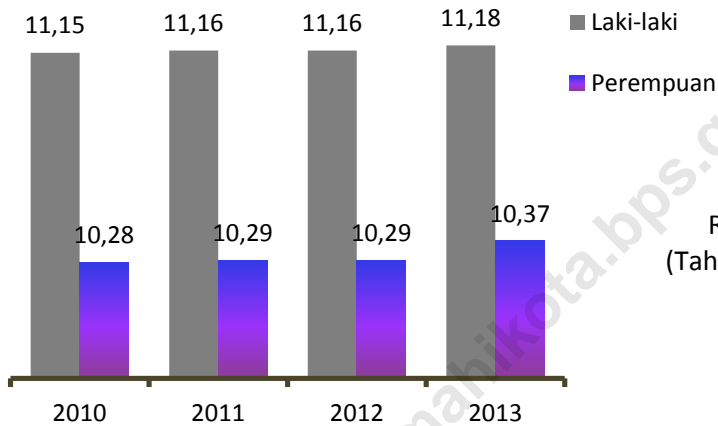
Sumber : BPS RI

Gambar 4.3 menyajikan AMH laki-laki dan perempuan untuk periode 2010-2013. Kedua AMH ini terus meningkat, akan tetapi perkembangannya lebih lambat untuk laki-laki daripada perempuan. Dengan demikian, meskipun AMH perempuan masih tetap lebih rendah daripada laki-laki, tetapi perkembangannya lebih menggembirakan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kesenjangan AMH antara laki-laki dan perempuan terkikis secara perlahan namun pasti.

Rata-rata Lama Sekolah

Menurut hasil Susenas 2010-2013, rata-rata lama sekolah (RLS) atau panjangnya tahun rata-rata yang dijalani penduduk untuk menyelesaikan pendidikan formal, di Kota Cimahi tidak mengalami banyak peningkatan pada kurun waktu tersebut. Demikian juga untuk RLS penduduk perempuan. Pada Tahun 2012 RLS perempuan sebesar 10,29 tahun tidak berubah bila dibandingkan dengan Tahun 2011 (Gambar 4.4). Sedangkan Tahun 2011 RLS perempuan hanya mengalami perubahan

sebesar 0,01 poin dari 10,28 tahun pada Tahun 2010. Pada Tahun 2013 terjadi peningkatan cukup besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hingga mencapai 10,37 tahun. Meskipun demikian selisih



Gambar 4.4
Rata-rata Lama Sekolah
(Tahun) Kota Cimahi, 2010-
2013

Sumber : BPS RI

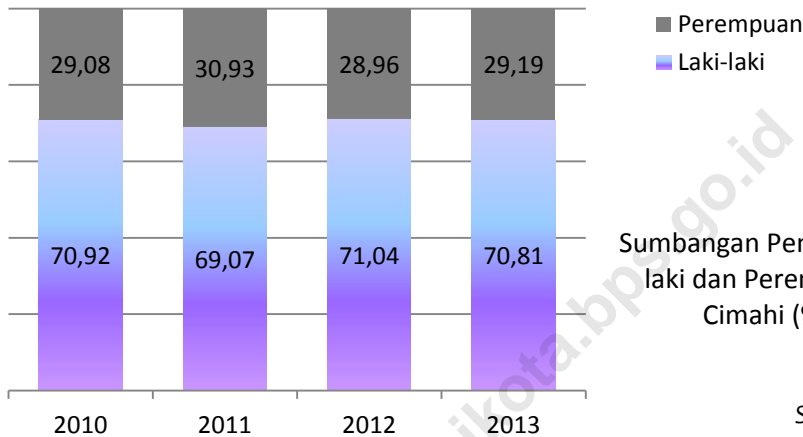
nilai di antara kedua jenis kelamin ini tetap tidak mengalami perubahan yang menunjukkan bahwa kesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan belum mengalami banyak perbaikan.

Sumbangan Perempuan Terhadap Pendapatan

Gambar 4.5 menyajikan perkembangan sumbangan pendapatan dalam pekerjaan di sektor non pertanian baik dari penduduk laki-laki maupun perempuan di Kota Cimahi.

Pada Tahun 2010, perempuan menyumbang 29,08 persen dari seluruh pendapatan pekerja di sektor non pertanian. Nilai ini meningkat sebesar 1,88 persen pada Tahun 2011 menjadi 30,93 persen. Sayangnya, pada Tahun 2012 menurun kembali sebanyak 1,97 persen menjadi 28,96

persen. Pada Tahun 2013 sumbangan perempuan terhadap pendapatan di sektor non pertanian ini kembali meningkat menjadi 29,19 persen.



Gambar 4.5
Sumbangan Pendapatan Laki-laki dan Perempuan di Kota Cimahi (%), 2010-2013

Sumber : BPS RI

Sumbangan pendapatan perempuan ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu peran perempuan dalam angkatan kerja dan upah yang diterima oleh perempuan. Faktor upah, secara nominal setiap tahun selalu mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan. Kenaikan upah ini biasanya disebabkan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya kebutuhan hidup yang selalu mengalami kenaikan agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Sementara dari sisi angkatan kerja, berdasarkan data Sakernas angkatan kerja perempuan pada Tahun 2012 adalah sebesar 33,07 persen dari total angkatan kerja di Kota Cimahi. Terlihat bahwa sumbangan perempuan terhadap upah lebih kecil dari sumbangannya terhadap angkatan kerja. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upah yang diterima perempuan dibandingkan upah yang diterima laki-laki. Penduduk perempuan menerima upah lebih rendah daripada laki-laki.



DISPARITAS PEMBANGUNAN JENDER

Stereotip perempuan sebagai makhluk yang lemah dan hanya berkuat pada urusan rumah tangga saja makin lama makin memudar. Hal ini didukung oleh semakin terbukanya peluang perempuan untuk berpartisipasi di berbagai bidang pembangunan. Peranan perempuan untuk turut serta di berbagai bidang pembangunan telah diakui dan dihargai. UUD 1945 pun tidak memuat satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki persamaan hak dan kewajiban untuk menjalankan perannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada kenyataannya, perempuan masih mengalami ketertinggalan dibandingkan laki-laki pada bidang-bidang seperti pendidikan, ketenagakerjaan, maupun pengambilan keputusan. Namun demikian, pemerintah terus berupaya mendorong keterlibatan perempuan dengan menjadikannya sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dalam pembangunan nasional. Upaya-upaya pemerintah ini dilakukan antara lain dengan peningkatan kapabilitas dasar SDM, upaya pengentasan

kemiskinan, peningkatan kualitas dan kemandirian manusia, serta upaya untuk mendorong peran aktif dan swadaya seluruh masyarakat.

Kesenjangan di Bidang Pendidikan

Studi-studi tentang jender saat ini banyak melihat bahwa ketimpangan jender terjadi akibat rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum lelaki. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan adalah memperkuat kedudukan kaum perempuan dengan mendidik dan mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan.

Pendidikan sesungguhnya adalah upaya sadar seseorang atau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman. Penduduk dengan kemampuannya sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sehingga di masa depan mereka dapat hidup lebih layak. Dengan demikian, pendidikan adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Tidak itu saja, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya.

Pendidikan juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada ketidaksetaraan jender. Ketidaksetaraan pada sektor pendidikan telah

menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap ketidaksetaraan jender secara menyeluruh. Latar belakang pendidikan yang belum setara antara laki-laki dan perempuan akan menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan jender dalam semua sektor seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat sampai pada masalah menyuarakan pendapat dan mengambil keputusan.

Di Kota Cimahi sendiri, kondisi masyarakat secara umum dari sisi pendidikan pada periode 2011-2013 tampaknya relatif cukup baik. Walaupun secara umum angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cimahi masih menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi angka partisipasi sekolah perempuan justru terkadang lebih tinggi daripada laki-laki.

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata lamanya waktu dari penduduk berusia 15 tahun keatas dalam menempuh pendidikannya sedangkan angka partisipasi sekolah menunjukkan persentase anak usia tertentu yang berstatus sedang bersekolah diantara sekelompok anak yang berada pada kelompok usia sekolah tertentu. Dengan demikian, angka RLS menunjukkan gambaran tingkat pendidikan penduduk secara umum sedangkan APS adalah gambaran kondisi pendidikan anak pada kelompok usia tertentu.

Pada Tabel 5.1 dibawah terlihat bahwa di periode 2012-2013 APS laki-laki di semua kelompok umur mengalami penurunan sedangkan APS perempuan justru mengalami peningkatan. Hal ini tentu menggembirakan bagi perempuan karena peningkatan angka ini menunjukkan indikasi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya sekolah sebagai pembuka wawasan. Di sisi lain, menjadi suatu pertanyaan

bagi kaum laki-laki mengenai turunnya angka APS ini terutama di kelompok usia 16-18 yang cukup nyata dimana penurunannya mencapai 10,12 persen (dari 81,01 persen pada Tahun 2012 menjadi 70,89 persen pada Tahun 2013). Sementara penurunan APS laki-laki pada kelompok usia 7-12 hanya 0,11 persen (dari 99,30 persen di Tahun 2012 menjadi 99,19 persen di Tahun 2013) dan pada kelompok usia 13-15 hanya 0,66 persen (dari 95 persen pada Tahun 2012 menjadi 94,34 persen pada Tahun 2013). Hal ini harus menjadi peringatan bagi dinas terkait agar bila fenomena serupa terjadi lagi pada tahun berikutnya maka harus segera diselidiki permasalahannya sehingga tindakan bisa segera dilakukan.

Tabel 5.1

Angka Partisipasi Sekolah (APS)¹⁾ Kota Cimahi Menurut Kelompok Usia Sekolah Dan Jenis Kelamin, Tahun 2011 – 2013

Kelompok Usia Sekolah, Jenis Kelamin		2011	2012	2013
(1)		(2)	(3)	(4)
7 - 12	Laki-laki	100,00	99,30	99,19
	Perempuan	99,26	99,26	99,38
	L+P	99,64	99,28	99,30
13 – 15	Laki-laki	91,04	95,00	94,34
	Perempuan	93,42	94,20	96,55
	L+P	92,31	94,57	95,50
16 - 18	Laki-laki	71,64	81,01	70,89
	Perempuan	72,73	68,66	79,75
	L+P	72,18	75,34	75,32

Sumber : Susenas 2011-2013 Kota Cimahi

Catatan : ¹⁾ Termasuk pendidikan non-formal (Paket A, Paket B dan Paket C)

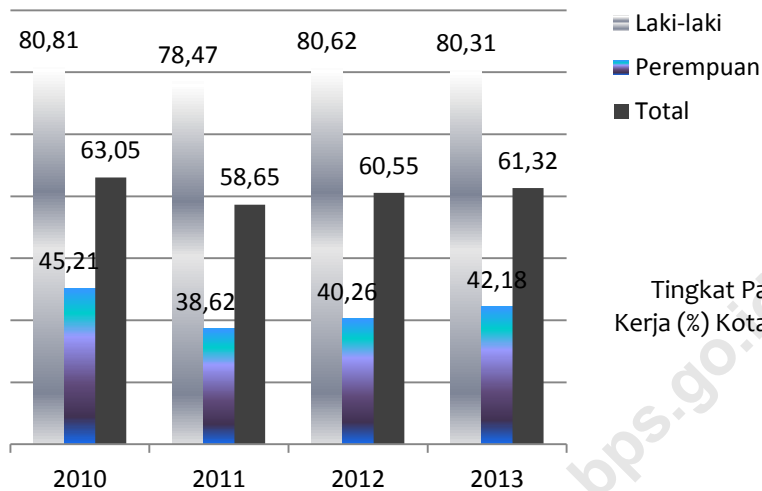
Kesenjangan di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Kesejahteraan merupakan harapan dan tujuan hidup setiap orang. Tingkat kesejahteraan setiap orang dapat berbeda-beda dalam arti keadaan kesejahteraan yang dialami seseorang belum tentu sama bagi orang lain. Namun secara umum kesejahteraan ekonomi dari suatu keluarga biasanya didefinisikan sebagai tingkat kepuasan atau tingkat pemenuhan kebutuhan yang telah diperoleh oleh keluarga.

Sebelumnya terdapat stereotip yang melekat pada perempuan bahwa secara ekonomi peran perempuan adalah menambah penghasilan keluarga. Dalam pandangan budaya tradisional, perempuan lebih cocok mengerjakan peran reproduktif sementara peran produktif lebih cocok dilakukan oleh laki-laki. Akan tetapi dewasa ini, peran perempuan semakin bertambah besar dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan keluarga. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat peranan perempuan saat ini secara ekonomi adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran yang seluruhnya didapatkan dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

○ Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan sedang bekerja atau mencari kerja (menganggur), mereka tergolong penduduk yang aktif secara ekonomi. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan berstatus bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya sehingga tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi.



Gambar 5.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kota Cimahi, 2010-2013

Sumber : BPS RI

Perbandingan penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas secara keseluruhan menggambarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada Tahun 2013, TPAK penduduk Kota Cimahi adalah 61,32 persen dengan TPAK laki-laki 80,31 persen dan TPAK perempuan 42,18. Disini tampak bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Hanya 42,18 persen dari perempuan yang masuk dalam angkatan kerja sedangkan sisanya lebih banyak berada dalam peran domestik sebagai pengurus rumah tangga (**Lampiran**). Namun demikian, nilai TPAK perempuan pada Tahun 2013 ini telah menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

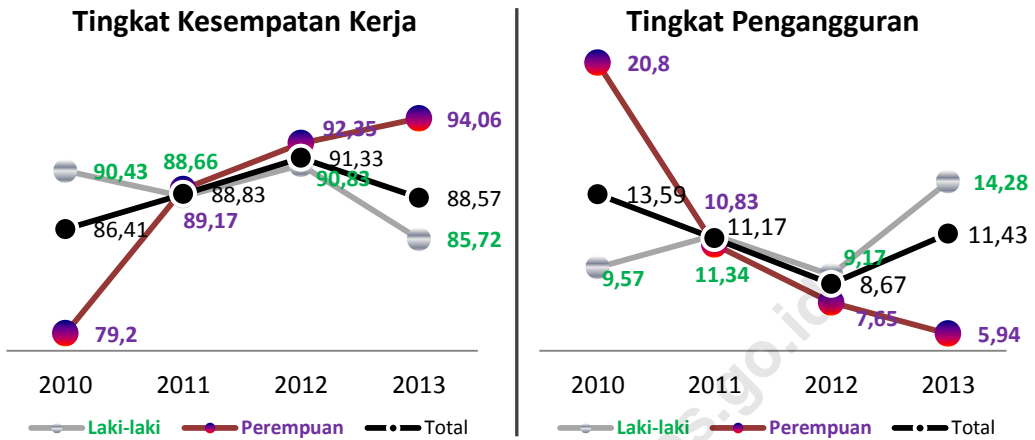
Pelabelan perempuan sebagai penanggung jawab rumah tangga memang masih sangat kuat. Hal ini membuat perempuan menjadi pihak yang sangat bergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Posisi mereka menjadi sangat rapuh karena lemahnya *bargaining power* mereka dalam

rumah tangga dan selanjutnya menyebabkan kurangnya partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga.

○ **Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran**

Seperti yang kita ketahui, angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja maupun mencari pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap total jumlah angkatan kerja. Angka ini menggambarkan tingkat keberhasilan mendapatkan pekerjaan dalam kelompok penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja. Sejalan dengan itu, tingkat pengangguran, atau secara teknis disebut tingkat pengangguran terbuka, adalah perbandingan jumlah mereka yang sedang mencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan demikian, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang era. Bila tingkat kesempatan kerja meningkat maka tingkat pengangguran akan turun. Demikian juga sebaliknya.

Terdapat hal yang menarik bila kita memperhatikan Gambar 5.2 dan 5.3. Pada Tahun 2010 terjadi perbedaan yang cukup besar dalam tingkat kesempatan kerja laki-laki dan perempuan. 90,43 persen dari angkatan kerja laki-laki telah berstatus bekerja, hanya 9,57 yang berstatus mencari pekerjaan. Sementara itu, hanya 79,2 persen angkatan kerja perempuan yang berstatus bekerja. Sisanya sebanyak 20,8 persen masih berstatus mencari pekerjaan. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan pekerjaan.



Gambar 5.2

Tingkat Kesempatan Kerja (%) dan Tingkat Pengangguran Kota Cimahi, 2010-2013

Sumber : BPS RI

Namun pada Tahun 2011 terjadi perubahan yang cukup nyata. Persentase perempuan yang berstatus bekerja naik cukup drastis dan bahkan melebihi persentase laki-laki yang berstatus bekerja. Kondisi ini terus terjadi pada Tahun 2012. Pada Tahun 2013 perbedaan persentase perempuan dan laki-laki yang berstatus bekerja ini bahkan bertambah jauh dengan anjloknya persentase laki-laki pekerja. Hal ini tentu secara langsung berdampak pada tingkat pengangguran laki-laki yang naik drastis dari 9,17 persen di 2012 menjadi 14,28 persen di 2013.

Tampaknya telah terjadi pergeseran pandangan bahwa tidak hanya laki-laki, perempuan pun memiliki kemampuan cukup baik bila diberi kesempatan untuk bekerja. Bahkan tenaga kerja perempuan memiliki kelebihan dalam hal ketelitian dan kesabaran. Namun demikian meningkatnya angka pengangguran penduduk laki-laki tetap harus diwaspadai mengingat bagian terbesar dari angkatan kerja adalah laki-laki.

LAMPIRAN 1.

Indeks Pembangunan Jender (IPJ) di Provinsi Jawa Barat
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011

Kab/Kota (1)	Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp PPP)		IPG (10)
	L (2)	P (3)	L (4)	P (5)	L (6)	P (7)	L (8)	P (9)	
Kab Bogor	66,94	70,90	98,14	93,30	8,21	7,48	74,58	25,42	62,14
Kab Sukabumi	65,15	69,09	99,27	96,44	7,13	6,45	74,45	25,55	60,05
Kab Cianjur	64,11	68,00	99,28	97,53	7,14	6,51	80,93	19,07	52,55
Kab Bandung	67,09	71,06	99,81	98,50	9,01	8,18	68,49	31,51	68,26
Kab Garut	63,72	67,59	99,34	98,14	7,62	7,09	70,97	29,03	63,57
KabTasikmalaya	66,03	70,01	99,65	98,34	7,71	7,02	74,48	25,52	60,53
Kab Ciamis	65,37	69,32	99,14	96,76	7,88	7,44	67,61	32,39	66,15
Kab Kuningan	65,55	69,51	98,41	94,59	7,73	7,12	73,34	26,66	61,17
Kab Cirebon	63,42	67,28	95,46	88,75	7,40	6,51	74,23	25,77	57,84
Kab Majalengka	64,46	68,36	98,66	92,86	7,76	6,80	76,66	23,34	57,82
Kab Sumedang	65,50	69,45	98,86	97,39	8,18	7,81	67,21	32,79	67,24
Kab Indramayu	64,92	68,84	92,85	77,44	6,97	5,23	81,35	18,65	50,79
Kab Subang	67,47	71,43	95,53	88,58	7,61	6,38	71,74	28,26	62,37
Kab Purwakarta	65,15	69,08	98,41	94,81	8,19	7,07	73,76	26,24	62,40
Kab Karawang	64,79	68,71	96,89	90,84	7,99	6,73	74,15	25,85	60,58
Kab Bekasi	67,47	71,43	96,98	91,69	9,16	8,02	76,86	23,14	59,87
Kab Bandung Barat	66,72	70,69	99,37	98,88	8,44	7,80	68,28	31,72	68,17
Kota Bogor	66,94	70,91	99,16	98,07	10,94	8,98	71,53	28,47	67,13
Kota Sukabumi	67,52	71,47	99,93	99,36	9,89	9,32	74,26	25,74	63,63
Kota Bandung	67,80	71,75	99,96	99,64	10,84	10,10	68,12	31,88	69,65
Kota Cirebon	66,57	70,54	99,54	97,02	10,81	9,29	69,99	30,01	67,58
Kota Bekasi	67,72	71,67	99,83	98,37	11,22	10,16	73,07	26,93	66,46
Kota Depok	71,25	75,05	99,84	98,50	11,90	10,54	69,18	30,82	72,68
Kota Cimahi	67,26	71,22	99,95	99,70	11,16	10,29	69,07	30,93	67,40
Kota Tasikmalaya	67,94	71,89	99,85	99,28	9,33	8,44	69,40	30,60	68,11
Kota Banjar	64,37	68,27	98,67	96,17	8,67	7,79	75,79	24,21	59,40
Jawa Barat	66,27	70,25	98,03	94,61	8,42	7,64	72,62	27,38	63,25

Sumber : BPS RI

LAMPIRAN 2.

Indeks Pembangunan Jender (IPJ) di Provinsi Jawa Barat
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2012

Kab/Kota (1)	Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp PPP)		IPG (10)
	L (2)	P (3)	L (4)	P (5)	L (6)	P (7)	L (8)	P (9)	
Kab Bogor	67,34	71,33	98,22	93,39	8,22	7,48	73,96	26,04	62,53
Kab Sukabumi	65,46	69,42	99,31	96,54	7,23	6,54	74,17	25,83	60,60
Kab Cianjur	64,45	68,35	99,30	97,55	7,18	6,52	80,91	19,09	52,99
Kab Bandung	67,16	71,13	99,83	98,52	9,01	8,19	67,99	32,01	68,89
Kab Garut	64,10	67,99	99,35	98,22	7,62	7,09	70,43	29,57	63,90
KabTasikmalaya	66,25	70,24	99,67	98,36	7,72	7,02	74,31	25,69	60,97
Kab Ciamis	65,55	69,50	99,15	97,12	7,88	7,44	66,19	33,81	66,65
Kab Kuningan	65,67	69,63	98,47	94,60	7,79	7,23	72,92	27,08	61,67
Kab Cirebon	63,53	67,39	95,51	88,80	7,41	6,52	74,84	25,16	58,17
Kab Majalengka	64,71	68,63	98,68	92,88	7,76	6,80	75,67	24,33	58,14
Kab Sumedang	65,61	69,56	98,89	97,42	8,27	7,82	66,61	33,39	67,47
Kab Indramayu	65,31	69,26	92,87	77,46	6,97	5,23	80,46	19,54	51,24
Kab Subang	67,61	71,58	95,55	88,60	7,61	6,38	71,43	28,57	62,82
Kab Purwakarta	65,43	69,38	98,70	95,05	8,26	7,16	72,58	27,42	62,87
Kab Karawang	65,08	69,02	96,90	90,85	8,15	6,87	73,61	26,39	61,08
Kab Bekasi	67,80	71,78	97,11	91,81	9,23	8,13	76,85	23,15	60,51
Kab Bandung Barat	66,75	70,72	99,38	98,90	8,45	7,81	67,40	32,60	68,49
Kota Bogor	67,04	71,01	99,48	98,48	10,94	9,37	71,53	28,47	67,87
Kota Sukabumi	67,77	71,74	99,96	99,39	9,89	9,32	74,81	25,19	64,19
Kota Bandung	67,87	71,82	99,97	99,65	10,89	10,34	68,11	31,89	70,64
Kota Cirebon	66,59	70,56	99,73	97,21	11,01	9,49	69,98	30,02	68,21
Kota Bekasi	67,78	71,73	99,83	98,38	11,34	10,34	73,06	26,94	66,98
Kota Depok	71,37	75,17	99,87	98,52	11,90	10,55	68,88	31,12	72,94
Kota Cimahi	67,32	71,29	99,98	99,74	11,16	10,29	71,04	28,96	67,92
Kota Tasikmalaya	68,30	72,27	99,89	99,68	9,34	8,60	68,77	31,23	68,54
Kota Banjar	64,48	68,38	98,69	96,19	8,67	7,79	74,67	25,33	59,78
Jawa Barat	66,48	70,46	98,08	94,66	8,44	7,65	72,31	27,69	63,68

Sumber : BPS RI

LAMPIRAN 3.

Indeks Pembangunan Jender (IPJ) di Provinsi Jawa Barat
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2013

Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp PPP)		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab Bogor	68,17	72,11	98,66	94,76	8,22	7,49	73,86	26,14	63,47
Kab Sukabumi	65,86	69,82	99,33	97,27	7,36	6,57	73,69	26,31	61,57
Kab Cianjur	64,79	68,70	99,30	97,57	7,18	6,53	80,59	19,41	53,71
Kab Bandung	67,34	71,29	99,84	98,53	9,02	8,21	67,67	32,33	69,44
Kab Garut	64,50	68,40	99,49	98,57	7,63	7,09	69,93	30,07	64,76
Kab Tasikmalaya	66,76	70,72	99,68	98,45	7,72	7,03	73,96	26,04	61,72
Kab Ciamis	65,70	69,65	99,91	97,61	8,00	7,54	64,49	35,51	67,36
Kab Kuningan	66,06	70,03	98,48	94,61	7,87	7,26	72,45	27,55	62,48
Kab Cirebon	64,05	67,93	96,54	89,77	7,41	6,52	74,51	25,49	59,17
Kab Majalengka	65,36	69,29	98,69	94,02	7,77	6,90	75,24	24,76	59,25
Kab Sumedang	66,08	70,05	98,90	97,59	8,29	7,83	66,29	33,71	68,15
Kab Indramayu	65,70	69,66	92,89	79,04	6,98	5,53	80,08	19,92	52,43
Kab Subang	67,86	71,80	95,56	88,62	7,62	6,39	71,15	28,85	63,34
Kab Purwakarta	65,71	69,66	98,72	96,06	8,27	7,21	72,29	27,71	63,56
Kab Karawang	65,76	69,72	96,91	90,88	8,17	6,92	73,34	26,66	61,95
Kab Bekasi	68,42	72,36	97,13	92,91	9,30	8,37	76,60	23,40	61,57
Kab Bandung Barat	67,19	71,14	99,67	98,91	8,46	7,82	67,17	32,83	69,14
Kab Pangandaran	65,14	69,07	98,27	98,17	7,66	7,36	68,72	31,28	67,27
Kota Bogor	67,22	71,17	99,48	98,51	10,95	9,38	71,28	28,72	68,38
Kota Sukabumi	68,33	72,27	99,97	99,40	9,90	9,33	74,25	25,75	65,07
Kota Bandung	68,10	72,04	99,98	99,66	10,89	10,35	67,79	32,21	71,25
Kota Cirebon	67,01	70,96	99,74	98,00	11,02	9,50	69,44	30,56	69,11
Kota Bekasi	68,13	72,07	99,85	98,39	11,34	10,34	72,60	27,40	67,79
Kota Depok	71,71	75,47	99,88	98,54	11,90	10,55	68,48	31,52	73,63
Kota Cimahi	67,79	71,73	99,99	99,76	11,18	10,37	70,81	29,19	68,56
Kota Tasikmalaya	68,78	72,70	99,91	99,72	9,34	8,61	68,25	31,75	69,29
Kota Banjar	64,88	68,79	99,87	98,14	8,69	7,83	74,29	25,71	61,00
Jawa Barat	67,07	71,02	98,39	95,30	8,45	7,69	71,95	28,05	64,61

Sumber : BPS RI

LAMPIRAN 4.

Penduduk Kota Cimahi Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Kegiatan Seminggu Yang Lalu (1)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas)	207.896	205.652	413.548
Angkatan Kerja	163.146	79.416	242.562
- Bekerja	144.643	70.815	215.458
- Mencari Kerja	18.503	8.601	27.104
Bukan Angkatan Kerja	44.750	126.236	170.986
- Sekolah	24.236	23.484	47.720
- Mengurus Rumah Tangga	6.853	95.820	102.673
- Lainnya	13.661	6.932	20.593
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK (%) *	78,47	38,62	58,65
Tingkat Kesempatan Kerja –TKK (%) **	88,66	89,17	88,83
Tingkat Pengangguran Terbuka –TPT (%) ***	11,34	10,83	11,17

Sumber : SAKERNAS 2011 Kota Cimahi

- *) TPAK adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja
- **) TKK adalah proporsi penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja
- ***) TPT adalah proporsi penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja

LAMPIRAN 5.

Penduduk Kota Cimahi Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2012

Kegiatan Seminggu Yang Lalu (1)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas)	210.966	208.779	419.745
Angkatan Kerja	170.091	84.059	254.150
- Bekerja	154.489	77.630	232.119
- Mencari Kerja	15.602	6.429	22.031
Bukan Angkatan Kerja	40.875	124.720	165.595
- Sekolah	24.921	21.477	46.398
- Mengurus Rumah Tangga	1.945	96.307	98.252
- Lainnya	14.009	6.936	20.945
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK (%) *	80,62	40,26	60,55
Tingkat Kesempatan Kerja –TKK (%) **	90,83	92,35	91,33
Tingkat Pengangguran Terbuka –TPT (%) ***	9,17	7,65	8,67

Sumber : SAKERNAS 2012 Kota Cimahi

- *) TPAK adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja
- **) TKK adalah proporsi penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja
- ***) TPT adalah proporsi penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja

LAMPIRAN 6.

Penduduk Kota Cimahi Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Kegiatan Seminggu Yang Lalu (1)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas)	213.927	212.058	425.985
Angkatan Kerja	171.799	89.436	261.235
- Bekerja	147.258	84.121	231.379
- Mencari Kerja	24.541	5.315	29.856
Bukan Angkatan Kerja	42.128	122.622	164.750
- Sekolah	22.001	22.932	44.933
- Mengurus Rumah Tangga	4.299	92.118	96.417
- Lainnya	15.828	7.572	23.400
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK (%) *	80,31	42,18	61,32
Tingkat Kesempatan Kerja –TKK (%) **	85,72	94,06	88,57
Tingkat Pengangguran Terbuka –TPT (%) ***	14,28	5,94	11,43

Sumber : SAKERNAS 2013 Kota Cimahi

- *) TPAK adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja
- **) TKK adalah proporsi penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja
- ***) TPT adalah proporsi penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kota Cimahi
Jl. Entjep Kartawiria No.20 B Citeureup Cimahi
Telp/Fax: (022) 6645985, e-mail:bps3277@bps.go.id
Home Page: cimahikota.bps.go.id